

NAHDHATUL ULAMA DAN PERUBAHAN BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Muhammad

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin. Jalan Perintis
Kemerdekaan KM 10 Makassar. Telp. 08155024313. e-mail: alhamid.muhammad41@
gmail.com

Abstract

The aim of article to descriptive relationship between Nahdhatul Ulama institution and change of political culture in Indonesia. The first, explore many terminology of political culture, type of political culture and political behavior. Secondly, this article to analysis ideology of Nahdhatul Ulama and democracy. The last, this article recommended the new role of Nahdhatul Ulama to contribution in change of political culture in Indonesia.

Key words: Nahdhatul Ulama, democracy, and political culture

Pendahuluan

Demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Merekalah yang memilih undang-undang yang mengatur mereka dan mereka memilih pemimpin yang menerapkan undang-undang itu. Sistem yang dianut oleh pakta militer Barat dan pakta militer Timur (Komunis) sepakat bahwa pemerintah demokratik adalah pemerintah yang terdiri dari orang-orang yang dipilih oleh rakyat secara bebas dan atas kehendak murni mereka untuk menjadi pemimpin yang melaksanakan aspirasi

mereka. Tetapi dalam praktiknya sulit untuk dapat ditemukan realitanya secara utuh. Sebab di sana tidak jarang ditemukan kota-kota dan desa-desa 'di bumi hanguskan' di negeri yang mengangkat demokrasi sebagai sistem yang dianut, dengan alasan bahwa penduduk menentang demokrasi dan prinsip yang mereka pegang adalah bahwa kebebasan bagi rakyat dan tidak ada kebebasan bagi musuh rakyat. Dalam setiap sistem demokrasi, pemerintahan rakyat di atas segalanya. Istilah kedaulatan rakyat dapat ditemukan dalam kebanyakan perundang-undangan dunia karena dipandang sebagai kunci yang dapat membukakan pintu pemerintah demokrasi (Salim, 1996: 102-103).

Nahdhatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, juga senantiasa mengembangkan reformasi pemikiran dan tindakan tentang demokrasi. Sikap anti rasional dan menerima dengan dogmatis akan ajaran-ajaran pokok Islam, memang mengandung nilai-nilai positif karena akan mampu menjaga stabilitas keimanan dan kepercayaan dan seharusnya inilah yang harus senantiasa dikembangkan oleh NU. Akan tetapi dalam perkembangannya NU juga mulai berusaha menggabungkan pemikiran murni Islam dengan pemikiran barat. Dalam anggaran dasar organisasi NU didapati bahwa tujuan mendirikan organisasi itu adalah berpegang kepada salah satu mazhab yang empat. Namun yang menjadi penekanan panutannya adalah Imam Syafi'i. Dan memang, secara umum Syafi'i menjadi panutan bangsa Indonesia. Tapi sebagai akibat dari tinjauan syariat Islam hanya dari sudut fiqh Syafi'i saja, telah menimbulkan kesan bahwa Islam itu memang sempit. Namun, pada dekade sekarang ini, muncul letupan-letupan baru dari kalangan muda tradisionalis untuk mengadakan pembaharuan.

Kalangan muda itu, memahami Islam keluar dari orbit pemahaman tradisional. Namun letupan-letupan yang kurang mempunyai sistem akademis jelas merupakan suatu usaha yang sia-sia. Maka beberapa pemikiran Abdurrahman Wahid misalnya bukan saja tidak diterima di kalangan kaum tradisionalis sendiri, malahan kita hanya menganggapnya sebagai pemikiran "pancaroba". Memang letupan itu mengandung sebuah nilai dinamika dari pemikiran yang kreatif, tetapi yang dikehendaki dari seorang cendekiawan adalah dinamika pemikiran intelektual yang akademis dan sistematis. Hal ini dimaksudkan supaya dapat dipahami, terutama oleh insan-insan akademis. Hal inilah yang menarik untuk dikaji mengenai peran politik dari Nahdhatul Ulama setelah adanya letupan-letupan yang berusaha untuk menggabungkan nilai tradisional dengan Islam, begitu pula usaha penggabungan Islam dengan pemikiran barat (Abadi, 1989: 75-76).

Terminologi Budaya Politik

Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktur dan sistem politik. Mengenai pembahasan tentang budaya politik (*political culture*) beberapa ahli menyetujui pandangan agar disatu temakan dengan pembahasan tentang struktur politik (*political structure*), karena hal ini berhubungan dengan fungsi konversi (*conversion function*) dan kapabilitas sistem (*capabilities sistem*).

Kebudayaan politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Setiap masyarakat dari suatu negara memiliki budaya politik. Demikian pula individu-individu yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa memiliki orientasi, persepsi terhadap sistem politiknya. Hal ini terjadi dalam masyarakat modern dan masyarakat tradisional, bahkan masyarakat primitif sekalipun. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa dalam kaitan budaya politik, individu-individu dalam masyarakat itu menilai tempat dan peranannya dalam sistem politik. Pengertian budaya politik seperti itu menggerakkan pemahaman pada perpaduan antara dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Sudijono, 1995: 35-37).

Sebenarnya dengan memahami kebudayaan politik, paling tidak dapat diperoleh dua manfaat. Pertama, sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, respon-respon, dukungan, dan orientasinya terhadap sistem politik. Kedua, dengan memahami hubungan antara kebudayaan politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

Nahdhatul Ulama dalam Perspektif Sejarah

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut (www.wikipedia.com). Karena sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren

juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Di dorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdhatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (13 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik (Abadi, 1989: 102-105).

Budaya Politik Nahdhatul Ulama

Prinsip-prinsip dasar yang dicanangkan Nahdhatul Ulama (NU) telah diterjemahkan dalam perilaku konkret. NU banyak mengambil kepeloporan dalam sejarah bangsa Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi ini hidup secara dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Prestasi NU antara lain:

1. Menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, sebagaimana diwariskan oleh para wali songo dan pendahulunya.
2. Mempelopori perjuangan kebebasan bermadzhab di Mekah, sehingga umat Islam sedunia bisa menjalankan ibadah sesuai dengan madzhab masing-masing.
3. Mempelopori berdirinya Majelis Islami A'la Indonesia (MIAI) tahun 1937,

- yang kemudian ikut memperjuangkan tuntutan Indonesia berparlemen.
4. Memobilisasi perlawanan fisik terhadap kekuatan imperialis melalui Resolusi Jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945.
 5. Berubah menjadi partai politik, yang pada Pemilu 1955 berhasil menempati urutan ketiga dalam perolehan suara secara nasional.
 6. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang diikuti oleh perwakilan dari 37 negara.
 7. Mempelopori gerakan Islam kultural dan penguatan *civil society* di Indonesia sepanjang dekade 90-an.

Menarik untuk diapresiasi, bahwa pemikiran segar yang berkembang dalam tubuh NU bukanlah pemikiran yang bersifat elitis. Pemikiran tersebut di usung secara bersama-sama oleh sekumpulan yang biasa disebut dengan “anak muda NU”. Mereka melakoni pemikiran keagamaan untuk transformasi sosial. Selain itu, isu-isu yang diangkat pun cukup beragam, antara lain: Pertama, pergulatan masyarakat sipil. Tidak bisa dipungkiri bahwa, NU sebagai organisasi masih belum sempurna dikarenakan masih terkesan sangat sederhana. Artinya, NU secara organisatoris belum tertata rapi. Selain itu, wacana partisipatoris masih menjadi kendala dalam masyarakat yang sudah lama menganut paternalisme. Karena itu, beberapa masyarakat NU bergerak dalam penguatan masyarakat sipil, baik dalam bentuk penguatan organisasi maupun wacana dan gerakan (Misrawi, 2004: 56-57).

Kedua, kampanye Islam progresif dan transformatif. Di tengah maraknya wacana Islam yang fundamentalis dan radikal, NU sebagai bagian dari dinamika keberagaman di tanah air ingin memperkaya wacana keislaman dengan corak yang lebih progresif dan transformatif. Wacana keislaman tidak hanya berwajah teosentris, melainkan berwajah antroposentris; mempunyai perhatian serius terhadap problem kemanusiaan. Perhatian Islam terhadap isu-isu kekinian, terutama isu yang berkaitan dengan hajat masyarakat akar rumput akan semakin memperteguh visi agama sebagai jalan yang menyelamatkan, bukan jalan yang menghambat dan menakutkan. Islam progresif mengandaikan bahwa makna-makna yang terkandung dalam agama mesti dikuak secara terus menerus, sehingga agama tidak stagnan, tidak berjalan di tempat, yang akhirnya tidak mencemarkan ruang hayati keberagaman.

Ketiga, gender. Tidak bisa dipungkiri, bahwa isu gender merupakan salah satu isu terpenting yang diusung anak-anak muda NU. Gagasan gender tersebut menghendaki adanya wawasan gender dan keterlibatan perempuan dalam ruang publik. Terbitnya buku *Uqud al Lujayn* dengan tafsir baru telah memperkaya wacana gender di lingkungan NU. Bukan hanya itu, NU telah

membuktikan bahwa seorang muslim bisa menjamin adanya pandangan dan sikap keberagaman yang mencerminkan kesetaraan. Pembacaan terhadap teks senantiasa didasarkan kepada semangat tujuan syari'at (*maqashid al syariah*) yang memberikan ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender. Bila dilihat dengan kaca mata sejarah, sikap NU yang seperti ini bukanlah isapan jempol, melainkan sikap perempuan NU pada umumnya yang terlibat langsung dalam melawan para Imperialis.

Keempat, rekonsiliasi korban tragedi G 30 S PKI. Dalam Sketsa Sejarah nasional, NU mempunyai beban sejarah yang seringkali digunakan oleh kelompok lain untuk menstigmakan NU sebagai komunitas yang terlibat dalam tragedi G 30 S PKI di satu sisi, tapi di sisi lain NU justru dicurigai sebagai komunitas yang dicurigai berkolaborasi dengan komunis, bahkan dicap "komunis". Buktinya, sejumlah anak muda NU secara eksplisit menyebutkan dirinya sebagai "kelompok kiri" dalam arti membela kaum yang dilemahkan dan yang ditindas. Karena itu, tidak aneh bila jalan menuju rekonsiliasi menjadi sebuah keniscayaan. Luka sejarah yang begitu mendalam ini mesti bersama dalam satu atap, yaitu atap kemanusiaan dan atap kebangsaan. Di sini lalu bermunculan beberapa LSM NU yang bergerak dalam upaya rekonsiliasi untuk membangun kesadaran baru dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bahwa sejarah itu pada dasarnya hanya menjadi alat rezim orde baru untuk menstigmakan eks G 30 S PKI.

Kelima, resolusi konflik. Di tengah maraknya kekerasan dan konflik di level akar rumput, baik konflik yang didasari problem keberagaan maupun politik dan ketidakadilan ekonomi, NU mencoba untuk melihat konflik sebagai "akibat", bukan "sebab". Nalar konflik sebagai akibat, berasumsi bahwa konflik bukanlah sebuah kenyataan yang serta merta dan ketidakdewasaan budaya "hidup bersama" masyarakat kita. Dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat berada dalam penyeragaman cara pandang dan sikap, yang pada waktu itu merupakan "narasi besar" Orde Baru. Dan dampak dari semua itu, perbedaan dan keragaman yang dihembuskan demokratisasi menuai ongkos mahal yang mesti dibayar, yaitu ketidaksiapan untuk berbeda. Di sinilah, sebagai komitmen untuk mengukuhkan semangat kerakyatan dan kebangsaan, beberapa lembaga swadaya masyarakat NU mencoba melakukan kegiatan yang memberikan perhatian besar kepada pencarian akar-akar persoalan yang sebenarnya dan mengupayakan resolusi konflik, dengan melihat problem-problem mendasar terjadinya konflik, sekaligus langkah-langkah yang mesti diambil untuk menyelesaikan konflik di masa yang akan datang.

Keenam, agama dan budaya lokal. Tidak bisa dipungkiri bahwa NU tumbuh dalam komunitas-komunitas lokal yang hingga kini masih mempertahankan tradisi dan lokalitasnya. NU sebagai bagian dari entitas tersebut harus mengakomodasi masyarakat-masyarakat lokal agar mendapatkan ruang yang sama dalam konteks mengekspresikan diri dan berdemokrasi. Agar agama lokal mesti dilihat sebagai hibriditas yang senantiasa menegosiasikan antara doktrin keagamaan dengan budaya setempat. Model keberagaman seperti ini adalah model rekonsiliasi yang terhormat, karena antara budaya lokal dan agama tidak ada yang dianaktirikan. Keduanya saling mengakui keterbatasannya, saling menyempurnakan dan melengkapi. Gagasan tentang pribumisasi Islam atau kebalikannya Islam pribumi, sebenarnya ingin meletakkan agama dan lokalitas secara proporsional.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, setidaknya terdapat dua pekerjaan yang mesti diselesaikan. Pertama, mengukuhkan visi kebangsaan yang dapat dijadikan “pijakan bersama” di antara berbagai dan perbedaan. Kedua, mengukuhkan visi kerakyatan yang akan mempertajam pemihakan dan *concern* bersama terhadap kaum lemah (*ad dhua'fa'*) dan yang dilemahkan (*al mustadh'afun*). Di manakah letak dan posisi NU dalam kedua gagasan besar tersebut?

Pemandangan kolosal ini menunjukkan metamorfosa yang cukup menakjubkan, dan bahkan mematahkan asumsi demokrasi sebagai jalan terbaik untuk mencapai konsensus yang dapat mewedahi keragaman. Artinya, demokrasi bukan melahirkan pandangan yang plural, melainkan semakin memunculkan memori kolektif, bahwa jumlah yang terbanyak adalah yang berhak untuk menentukan nasib bangsa ini. Pandangan ini merupakan pandangan standar yang digunakan kelompok Islam politik dan gerakan-gerakan keagamaan mutakhir (www.nu.or.id).

Banyak di antara kalangan nasionalis, terutama non-muslim yang bertanya: Di manakah posisi NU di tengah dahsyatnya kampanye formalisasi syariat? Apakah NU masih komitmen pada sikapnya yang moderat dan plural? Satu hal yang menjadi perhatian bersama, bahwa wacana keislaman mutakhir merupakan wacana yang terbuka, dapat disampaikan oleh siapa pun dan juga diakses siapa pun. Dalam situasi seperti ini, tentu saja NU diharapkan dapat menyuarakan kembali pandangannya secara lantang dan terbuka. Dan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar merupakan benteng terakhir bagi paradigma kebangsaan.

NU dalam sejarahnya merupakan organisasi keagamaan yang mempunyai pandangan keagamaan moderat dan progresif yang dapat memahami

dan menggauli konteks. Buktinya, NU masih tetap konsisten mengimani “kebangsaan” sebagai bagian terpenting dari keimanan. Namun sayang pemahaman ini bukanlah pemahaman Islam yang murni sesuai dengan dasar Islam tetapi dasar ini muncul disebabkan karena akulturasi pemikiran Islam dengan ide nasionalisme. Dan pemikiran seperti ini perlu diwaspadai sebab dapat mengaburkan pemikiran Islam yang benar (HTI, 2005: 67-69).

Islam kebangsaan yang dihembuskan oleh NU merupakan pemikiran yang dikembangkan oleh NU untuk mengakomodasi Islam di satu sisi dan diskursus kebangsaan di sisi lain. Menurut mereka Islam tidak perlu berdiri sendiri akan tetapi Islam dapat berinteraksi dan berdialog dengan gagasan semisal nasionalisme.

Islam kebangsaan menghendaki agar Islam dapat dijadikan sumber moral untuk mengusung kepentingan publik secara umum, apapun agama, suku dan rasnya. Karena itu, Islam kebangsaan melihat pilihan formalisasi syariat adalah pilihan yang perlu di soal lebih lanjut: apakah formalisasi syariat yang dimaksud adalah gerakan simbolik atau gerakan substansialistik? Itulah yang menjadi pokok fundamen masalah yang disoroti oleh kalangan ini yakni kalangan Islam kebangsaan yang *notabene* merupakan hasil modernasi pemikiran Islam dan barat.

Dari masa ke masa, NU selalu menjadi agen penting dari proses perubahan yang menentukan ikatan kebangsaan. Di awal kemerdekaan RI, NU mempunyai arti penting bagi proklamasi kemerdekaan. Para kiai ikut serta dalam menentukan detik-detik bersejarah, bahkan ikut menegaskan kepemimpinan Soekarno. Para kiai mempunyai andil besar bagi proklamasi RI dan terbentuknya negara yang adil dan berdaulat (Saefuddin, 1996: 23-24).

Selama orde baru berkuasa, NU pun memberikan keteladanan bagi keseimbangan yaitu tampil sebagai oposisi terhadap orde baru. Sikap oposisional NU tersebut ikut menguatkan proses penumbangan rezim Soeharto yang cenderung otoriter dan represif. Dukungan NU dalam upaya melakukan perlawanan telah menggerakkan nalar oposisional guna mengukuhkan reformasi dan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karenanya, sumbangsih NU dalam rancang bangun wacana kebangsaan mempunyai legitimasi yang kuat.

Di masa reformasi ini, NU menunjukkan identitasnya sebagai kantong pemikiran Islam yang cukup berwibawa. Bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran tersebut bermetamorfosis menjadi kekuatan yang bersifat transformatif. Pemikiran keagamaan yang progresif digunakan sebagai komitmen untuk melakukan pemberdayaan dan kerja-kerja pembebasan. Secara kultural, munculnya pemikiran progresif di lingkungan NU merupakan produk pergulatan NU dengan masyarakat sipil. Pilihan untuk kembali ke khittah tahun 1984 merupakan pilihan yang

sangat tepat, terutama telah mendorong NU menjadi lokomotif *civil society* di Indonesia. Bukan hanya itu, NU telah mempertahankan dan mengembangkan watak kemoderatan dan kerakyatan Islam. Pergulatan antara agama dan realitas yang dinahkodai NU menginspirasi adanya dialektika yang bersifat dinamis dan fungsional antara yang profan dengan yang sakral. Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan nilai yang melangit dan mengawang-awang, melainkan sebagai ajaran yang terlibat langsung dalam pergulatan realitas dan problem kemanusiaan secara umum. Di sinilah, lalu watak Islam bersifat transformatif, moderat, dan progresif sesuai dengan pandangan NU.

Daftar Pustaka

- Abadi, Samsul. 1989. *Peranan Politik Umat Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Hizbut Tahrir Indonesia. 2005. *Aceh Nusantara dan Khilafah Islamiyah*. Jakarta: HTI Press.
- Misrawi, Suhairi. 2004. *Menggugat Tradisi "Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU"*. Jakarta: Kompas.
- Salim, Ali al Bahnasawi. 1996. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. 1996. *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- www.nu.or.id/profile NU [29 April 2007].
- www.wikipedia.com/Nahdhatul Ulama [29 April 2007].